

**PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INFLASI, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016)**



Disusun oleh:

NINA NADHIROH

NIM. E2B014004

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2018

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
INFLASI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

(Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016)

Nina Nadhiroh

(E2B014004)

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah Semarang

Email: ninanadhiroh9@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta menggali potensi sumber pajak lain dan mengoptimalkan pencairan piutang pajak guna mendukung ketercapaian pendapatan asli daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditunjang oleh studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 35 kabupaten dan kota, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (*Ordinary Last Square*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 dan 0,029, sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,281 dan inflasi berpengaruh tetapi tidak signifikansi terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,320.

Kata kunci: Penerimaan pajak daerah, pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja modal.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah dikeluarkan pula peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sehingga, untuk pembangunan ekonomi pemerintah pusat juga membebaskan pemerintah daerah untuk mengolah, mengatur dan mengurus keuangannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Menurut Jamaluddin selaku anggota komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah PAD di daerah ini hanya mampu tercapai 90,36

persen dari target pada APBD. Rendahnya pencapaian target PAD merupakan dampak dari rendahnya kinerja dalam hal pemungutan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perlu juga dimasukkan ketentuan tersendiri mengenai pemungutan yang lebih detail pajak-pajak daerah lain sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lain, seperti pajak air permukaan dan pajak rokok. Sebab, jika potensi tersebut bisa dioptimalkan, akan besar peluang untuk bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Republika, 2016).

Menurut Mardiasmo (2002) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi (Shiska, 2011) inflasi (Haniz, 2013), jumlah pelanggan (Buntugajang, 2013), produk domestik regional bruto (Arianto, 2014), pengangguran (Rafsanjani, 2015), belanja pembangunan atau modal (Triastuti, 2016), pendapatan perkapita regional (Yunimurtianingsih, 2017), jumlah wisatawan (Yunimurtianingsih, 2017).

Faktor yang pertama adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kesejahteraan penduduk maupun pertumbuhan ekonomi disuatu negara atau daerah, karena ketika pendapatan rata-rata penduduk terpenuhi maka minat akan membeli suatu barang atau jasa juga akan terpenuhi, hal ini akan meningkat pula penerimaan pajak disuatu daerah.

Faktor yang kedua adalah produk domestik regional bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi

yang cukup besar terhadap penerimaan pajak sehingga semakin besar produk domestik regional bruto, maka akan semakin besar pula tingkat realisasi penerimaan pajak daerah.

Faktor ketiga yaitu inflasi. Besar kecilnya inflasi penerimaan dari sektor pajak juga dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas dipasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Faktor yang keempat adalah belanja modal. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bukan hanya menambah aset melainkan memelihara aset-aset tersebut agar terjaga dan bisa dipergunakan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian tentang fenomena diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini mengambil judul pengaruh pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan latar belakang sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?
2. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?
3. Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?

4. Apakah belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah?
5. Apakah pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah?

LANDASAN TEORI

Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro, 2013).

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. pendapatan perkapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB menurut BAPPEDA (2014) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Inflasi

Inflasi (*inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus, Venieris dan Sebold (1978:603) dalam Naga (2001:241), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (*a sustained tendency for the general level of prices to rise over time*).

Belanja Modal

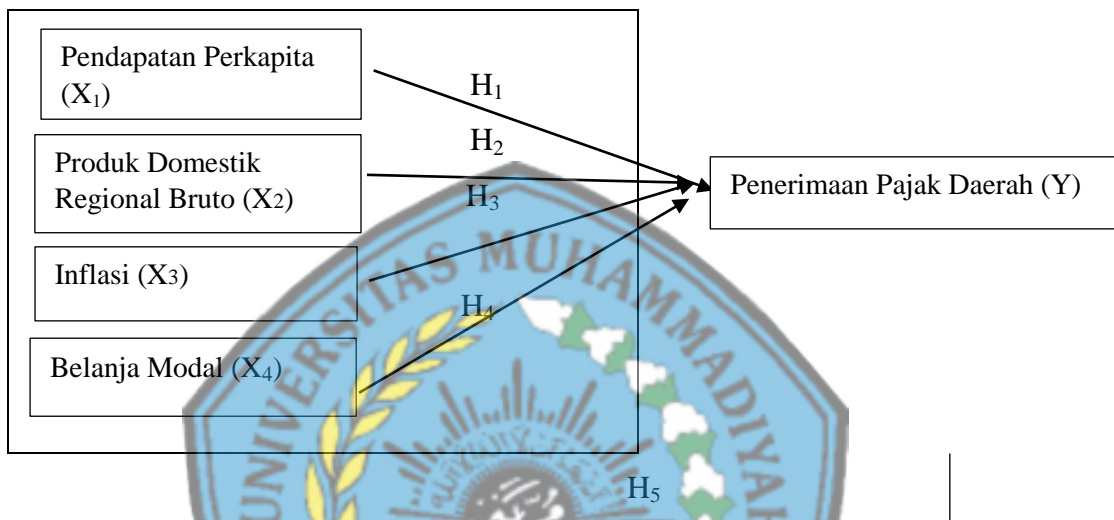
Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2013 mengemukakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan atau aset lainnya.

Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Siahaan (2010:64) dalam Maznawati (2015)

menyatakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten atau kota) memiliki jenis pajak yang berbeda.

Kerangka Berfikir



H1: Pendapatan perkapita berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

H2: Produk domestik regional bruto berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

H3: Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

H4 : Belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

H5: Pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Penelitian ini variabel dependennya adalah penerimaan pajak daerah, ditandai dengan lambang (Y).

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Perkapita

Variabel pendapatan perkapita ini dinyatakan dengan lambang (X1). Untuk menghitung pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu negara, karena penelitian ini studi kasusnya di lingkup daerah maka rumusnya pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk (Dumairy Tahun 1999 dalam penelitian Lestari Tahun 2016).

$$\text{IPC} = \text{Pendapatan Daerah} : \text{Jumlah Penduduk}$$

Keterangan:

IPC = *Income Per Capita* (Pendapatan Perkapita)

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Variabel Produk Domestik Regional Bruto dinyatakan dengan lambang (X3) yang diukur dengan satuan jutaan rupiah per tahun dan data yang tersedia menggunakan data tahunan. Menurut SIRUSA (Sistem Informasi Rujukan Statistik) tahun 2016 bahwa rumus untuk menghitung PDRB adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = PDRB tahun tertentu

PDRBt-1 = PDRB tahun sebelumnya

c) Inflasi

Variabel inflasi dinyatakan dengan lambang (X3) data yang tersedia menggunakan data tahunan dan diukur dengan satuan persen. Menurut Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 menjelaskan bahwa rumus inflasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju inflasi periode } n = \frac{\text{IHK periode } n - \text{IHK periode } n-1}{\text{IHK periode } n-1}$$

Keterangan:

IHK periode n = Indeks Harga Konsumen periode ini

IHK periode n-1 = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya

d) Belanja Modal

Variabel belanja modal dinyatakan dengan lambang (X4). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa rumus untuk mencari alokasi belanja modal adalah sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan dan Irigasi} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lain}$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 dan menggunakan probability sampling. Penelitian ini berjumlah 35 sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil merupakan data sekunder dimana data tersebut sudah tertulis maupun sudah dipublikasi oleh instansi daerah dan mengakses situs web www.bps.go.id.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (koefisien determinasi, uji t dan uji f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dan data dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Berikut disajikan objek penelitian dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Objek Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah	35
2.	Data Outlier	3
3.	Sampel terakhir	32

Analisis Data

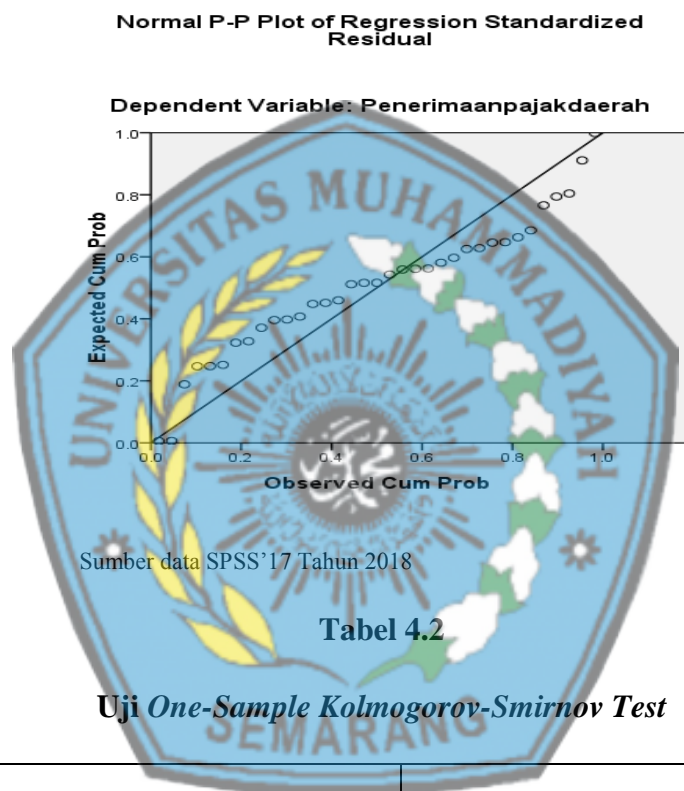
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Kurniawan (2014) uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov one sample test*.

Gambar 4.1

Analisis Grafik Normal Plot



	Unstandardized Residual
N	32
Kolmogorov-Smirnov Z	.900
Asymp. Sig (2-tailed)	.392

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber data SPSS 2018

Menurut Ghozali (2011) salah satu cara untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak dapat melihat *normal probability plot*.

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat titik-titik penyebaran data terhadap garis diagonal pada grafik, apabila data menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti pola distribusi normal. Jika data menyebar dan cenderung menjauh dari garis diagonal serta tidak mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan data tidak menunjukkan pola distribusi normal. Penelitian ini menunjukkan bahwa titik-titik penyebaran data pada diagonal grafik menyebar dan mengikuti garis diagonal, dengan kata lain berarti penelitian ini sudah terbebas dari uji normalitas. Untuk memperkuat terbebas dari uji normalitas dilakukan juga dengan uji *kolmogorov one sampel test* menunjukkan tingkat signifikansi tiap lebih dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi diatas 0,15. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* 0,392 yang berarti penelitian ini sudah terbebas dari uji normalitas karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda.

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Perkapita (X1)	.835	1.198
PDRB (X2)	.411	2.436
Inflasi (X3)	.901	1.110
Belanja Modal (X4)	.396	2.526

Sumber data SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa kelima variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan tidak ada

satupun variabel independen yang memiliki VIF > 10. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen (bebas) atau tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain. Persamaan regresi yang baik merupakan persamaan yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi setiap variabel independen lebih lesar dari 0,005 maka penelitian tersebut sudah terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Coefficients^a

Model	T	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	-.177	.861	
Pendapatan Perkapita (X1)	1.100	.281	Tidak ada heteroskedastisitas
PDRB (X2)	2.907	.007	Tidak ada heteroskedastisitas
Inflasi (X3)	-1.011	.320	Tidak ada heteroskedastisitas
Belanja Modal (X4)	2.300	.029	Tidak ada heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber data SPSS'17 Tahun 2018

Dari hasil pengujian dan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa empat variabel independen yaitu pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut

runtut waktu. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan sudah terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi dengan *Runs Test*

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	3.33618
Cases < Test Value	16
Cases \geq Test Value	16
Total Cases	32
Number of Runs	
Z	-1,617
Asymp.Sig. (2-tailed)	.106

Sumber data SPSS'17 Tahun 2018

Run test sebagai bagian dari statistik non-parametik yang dapat digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* 0,106 atau lebih besar dari 0,05 berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena menggunakan lebih dari dua variabel independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik f, dan nilai statistik t. Dibawah penjelasan lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam uji ini mencakup uji T, uji F, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Uji Statistik T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006) dalam (Arianto, 2014).

Tabel 4.7

Uji Statistik T (Parsial)

Model	T	Sig
1	-.177	.861
Pendapatan perkapita	1.100	.281
PDRB	2.907	.007
Inflasi	-1.011	.320
Belanja Modal	2.300	.029

Sumber data SPSS'17 Tahun 2018

Hasil dari uji t setiap variabel menunjukkan nilai yang berbeda. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hasil dari setiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Variabel pertama adalah pendapatan perkapita memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,281 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya pendapatan

perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Ketika pendapatan penduduk meningkat belum tentu penerimaan pajak daerah juga meningkat, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang digunakan untuk pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian bertentangan dengan hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini didukung oleh Tristiano (2015) menyatakan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame disebabkan pendapatan rata-rata penduduk setiap tahunnya tidak stabil atau tidak merata.

Variabel yang kedua adalah produk domestik regional bruto (PDRB) memperoleh nilai signifikansi 0,007 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini didukung dari hipotesis dua (H2). Produk domestik regional bruto mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi disuatu wilayah jika nilai PDRB lebih besar menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga lebih tinggi. Selain itu, peran dari suatu sektor ekonomi menunjukkan bahwa potensi atau basis perekonomian disuatu wilayah mendorong untuk membayar pajak daerah. Hal ini didukung penelitian dari Puspita (2014) mengemukakan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika sektor-sektor pembentuk PDRB naik, maka penerimaan pajak daerah pun akan naik. Selain penelitian dari Puspita ada juga penelitian dari Priadarma (2013) bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja dikarenakan semakin tinggi PDRB akan semakin meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.

Variabel yang ketiga yaitu inflasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,320 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa inflasi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penjelasannya karena di Provinsi Jawa Tengah yang terkena inflasi hanya 6 (enam) kota diantaranya, Cilacap, Tegal, Purwokerto, Kudus, Semarang, dan Surakarta, selain kota-kota

tersebut tidak terkena inflasi. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa inflasi di Provinsi Jawa Tengah sendiri berpengaruh walaupun hanya sedikit. Dengan demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis tiga (H3). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Triastuti (2016) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tingkat inflasi Kota Bandung dari tahun 2007-2014 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Sejalan dengan Tingkat Inflasi yang berfluktuasi, penerimaan pajak daerah Kota Bandung tetap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun untuk tahun 2007-2014.

Variabel yang keempat adalah belanja modal. Belanja modal menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,029 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini didukung hipotesis empat (H4). Belanja modal digunakan untuk membeli pembangunan aset berwujud yang digunakan untuk pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah, apabila suatu pembangunan daerah baik dan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri maka secara tidak langsung masyarakat tersebut sadar akan membayar pajak agar pembangunannya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Priadarma (2013) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan.

Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F (simultan) dalam analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 4.9
Uji Statistik F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.413	4	1.103	14.290	.000 ^a
Residual	2.239	29	7.721		
Total	6.652	33			

Sumber data SPSS'17 Tahun 2018

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel.

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.663	.617	8,787	1.635

Sumber data SPSS'17 Tahun 2018

Nilai R Square pada model regresi sebesar 0,663. Hal ini menunjukkan bahwa 66,3% variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen pada model, yang terdiri dari pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 33,7% dijelaskan variabel-variabel lain diluar model.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,663 yang artinya terdapat pengaruh pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 66,3% dan sisanya 33,7% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. Berikut ini kesimpulan dari hasil setiap variabel adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu (H1) bahwa nilai signifikansi sebesar 0,281 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Ketika pendapatan penduduk meningkat belum tentu penerimaan pajak daerah juga meningkat, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang digunakan untuk pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- b) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dua (H2) bahwa nilai signifikansi sebesar 0,007 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel produk domestik regional bruto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Produk domestik regional bruto mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi disuatu wilayah, jika nilai PDRB lebih besar menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Selain itu, peran dari suatu sektor ekonomi menunjukkan bahwa potensi atau basis perekonomian disuatu wilayah mendorong untuk membayar pajak daerah.
- c) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tiga (H3) bahwa nilai signifikansi sebesar 0,320 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel inflasi secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, karena di Provinsi Jawa Tengah yang terjadi inflasi hanya 6 (enam) kota diantaranya, Cilacap, Tegal, Purwokerto, Kudus, Semarang, dan Surakarta, selain kota-kota tersebut tidak terjadi inflasi.

- d) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis empat (H4) bahwa nilai signifikansi sebesar 0,029 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Belanja modal digunakan untuk membeli aset yang digunakan untuk pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah, apabila suatu pembangunan daerah baik dan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri maka secara tidak langsung masyarakat tersebut sadar akan membayar pajak agar pembangunannya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- e) Berdasarkan Uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,005 yang artinya pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pendapatan perkapita dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah karena data informasi pendapatan perkapita dan inflasi tidak tersedia dengan lengkap sehingga hasil dari penelitian ini menjadi bias.

Saran

Saran yang diberikan penulis untuk pemerintah maupun peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah baik pajak kabupaten atau kota maupun pajak provinsi agar pembangunan infrastruktur bisa tercapai diberbagai pelayanan sektor.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama diharapkan menambah variabel independen seperti pengangguran, jumlah industri maupun variabel lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Wahyu, Suweli & Suratno. 2007. *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Alista, Hervia Nanda (2014) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). Universitas Brawijaya Malang.
- Arianto, Suci Puspita (2014) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2016 Statistik Inflasi Kota Semarang diakses pada tanggal 06-11-2017 pukul 21:20
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jawa Tengah dalam Angka. *Indeks harga Konsumen dan Inflasi*.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jawa Tengah dalam Angka. *Pendapatan Regional*.
- Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2016. Keuangan Daerah dan Harga.
- BAPPEDA Kota Semarang. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto*.
- Dumairy. 1999. *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE.
- Dwi, Wulandari Ari (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kabupaten atau Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Farman, Gallantino.2016. Penunggak PKB Daerah ini Terbesar Se-Jateng. DDTC News. Diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 18:40.

- Fauziah, Isfatul (2014) Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salahsatu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya Malang.
- Freeman, R.E, and Reed. 1983. *Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance*.
- Gani, Ali Irsan Anshari Abdul (2016) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Malang).
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. I. 2006. *Statistik Non Parametric*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kurniawan, Albert. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan Kedua. CV ALFABETA. Bandung.
- Kurniawan, Panca, Agus Purwanto, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Jawa Timur
- Lestari, Siska (2016) Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Maznawaty, Elvi Syahria (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- MGMP Ekonomi. 2013. *Ekonomi MGMP Kabupaten Demak untuk SMA Kelas XI*. Demak: CV Bima Ria.
- Naga, Muana. 2001. *Makro Ekonomi: teori masalah dan kebijakan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Nastini, Chintia Ratna (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah. Universitas Brawijaya Malang.
- Novalistia, Rizka Lutfita (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). Universitas Pandanaran Semarang.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priadarma, Abdul dkk (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pelanggan dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja. Universitas Hasanudin Makassar.
- Pribadi, Bowo. 2016. Jawa Tengah Diminta Gali Potensi Sumber Pajak Lain. Republika. Diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 18:30.
- Rafsanjani, Fachry Ali (2015), Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran, dan Pendapatan Per Kapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dikota Batu Periode Tahun 2004-2013
- Ratdiananto, Adhika (2016) Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Dearah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)
- Samadi. 2006. *Geografi 2 SMA Kelas XI*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yudhistira.
- Santoso. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Shiska, Ery. (2010). Pengaruh-pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerag pada Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2009. Universitas Bangka Belitung.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. JayaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi: teori pengantar*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelimabelas. PT RajaGrafindo Persaja. Jakarta.
- Susanto, Iwan (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012). Universitas Brawijaya Malang.
- Triastusi, Dian (2016) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014)
- Trisianto (2015) Pengaruh Jumlah Industri, PDRB, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. STIE MDP, Palembang.

Wulandari, Yesi Dwi (2015) Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)

www.bpkp.go.id. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses pada tanggal 24-12-2017 pukul 09:49.

www.pajak.go.id. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses pada tanggal 21-12-2017 pukul 06:32.

www.sirusa.bps.go.id. *Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016*. Diakses tanggal 16 Januari 2018 diakses pukul 11.12.

Yunimartiningih, Evi (2017). Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur Tahun 2012-2016. Univeesitas Islam Indonesia.

Zain, Mohammad. (2010). *Managemen Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta

